



**RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA - PERUBAHAN)**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Soekarno – Hatta Desa Puncak Indah Malili 92981

email : kesbangpol.lutim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN

NOMOR : / / KesbangPol

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam urusan pemerintahan daerah, administrasi keuangan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, perlu disusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-Perubahan) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu menetapkan Surat Keputusan Rencana Kerja Perubahan (Renja-Perubahan) Tahun 2024 melalui Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 91);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 202.. tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor).

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk tim penyusun Rencana Kerja Perubahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim penyusun Rencana Kerja Perubahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas dalam perumusan dan penyusunan Renja Perubahan 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
Pada tanggal : 08 Juli 2024
Kepala Badan,



GUNTUR HAFID, S.Pd.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19710502 199208 1 001

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BKAD Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Peringgal.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

**RENJA PERUBAHAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL) TAHUN 2024**

Ketua : Kepala Badan Kesbangpol
Sekertaris : Kasubag. Perencanaan dan Keuangan

Anggota :

1. Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
2. Kabid. Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
3. Kabid. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
4. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
5. Staf Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Ditetapkan di : Malili
Pada tanggal : 08 Juli 2024
Kepala Badan,



GUNTUR HAFID, S.Pd.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19710502 199208 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah Azza Wa Jallah yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.

Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan politik khususnya di wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkuat NKRI dan meningkatkan kehidupan demokrasi di daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai – nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan daerah, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Demikianlah Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 16 Juli 2024

Kepala Badan,



GUNTUR HAFID,S.Pd.,M.Si

Pangkat. Pembina Utama Muda

NIP. 19710502 199208 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU.....	6
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai pada Triwulan II.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	23
BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	31
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	31
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	33
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	37
BAB V. PENUTUP.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai Triwulan I.....	6
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja IKU Badan KesbangPol.....	18
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja TPB dan SDGs.....	19
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....	24
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan KesbangPol.....	32
Tabel 3.2	Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	33
Tabel 4.1	Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Rumusan Rencana Tahun 2026.....	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Tahunan sebagai suatu gambaran tentang perencanaan yang terkait secara berjenjang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk tahun 2024. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tersebut memuat rencana program dan kegiatan tahun 2024 dengan mengacu pada permasalahan program kegiatan tahun 2024 dan didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024. Proses penyusunan Renja Perubahan 2024 ini berpedoman pada RKPD Kabupaten Luwu Timur dan juga Renstra Perangkat Daerah.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun alasan atau pertimbangan yang mendasar dilakukan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah :

- a. Adanya pergeseran pagu kegiatan;
- b. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan perubahan dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan RENJA Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 927);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Maksud disusunnya RENJA-PD adalah sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2024. Renja Perubahan disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2024, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Tujuan :

Tujuan disusunnya RENJA-PD adalah :

1. Mewujudkan visi - misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur;
2. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
4. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024; dan
5. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN ii TAHUN 2024

Pada bagian ini dijelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah dalam tahun berjalan, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah serta review terhadap rancangan awal RKPD Perubahan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini diuraikan mengenai rencana kerja yang diusulkan serta jumlah dan sumber pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada RKPD Perubahan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan serta Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan tugasnya yakni melaksanakan urusan Pemerintahan Umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. dalam menjalankan urusan tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2024 melaksanakan 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran yang dikelola sebesar Rp. 37.851.659.559,- (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 31.663.058.088,- (tiga puluh satu milyar enam ratus enam puluh tiga juta lima puluh delapan ribu delapan puluh delapan rupiah) atau 83,65% dan 90,28% berdasarkan anggaran kas pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.

Pelaksanaan program dan kegiatan sampai pada triwulan II tahun 2024 masih terdapat beberapa kegiatan yang masih terealisasi rendah khususnya pada program dan kegiatan kesekretariatan, namun secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan triwulan II telah terlaksana dengan baik. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II, dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	
			4		5		6		7		8		9		10		11		12=11/6x100%	
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	96,20	15.900.896.868	95,00	-	97	4.041.200.184		307.781.162		2.223.053.615		-		-		2.530.834.777	0,00%	62,63%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)		143.000.000	0,00	-	100	75.353.003	-	6.144.450	-	27.426.400		-		-		33.570.850	0,00%	44,55%
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)		95.500.000	0,00	-	3	38.392.300	-	3.135.600	1	14.399.900					1	17.535.500	33,33%	45,67%
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	6,00	22.500.000	0,00	-	2	4.492.400	-	-	-	1.392.000					-	1.392.000	0,00%	30,99%
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	30,00	25.000.000	0,00	-	10	32.468.303	4	3.008.850	2	11.634.500					6	14.643.350	60,00%	45,10%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)		11.247.746.868	0,00	-	100	1.986.362.901	-	233.489.287	-	812.087.043		-		-		1.045.576.330	0,00%	52,64%
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	57,00	10.942.746.868	0,00	-	14	1.895.421.301	14	228.763.437	14	783.433.043					7	1.012.196.480	50,00%	53,40%
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	54,00	305.000.000	0,00	-	18	90.941.600	5	4.725.850	4	28.654.000					9	33.379.850	50,00%	36,70%

3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)		10.500.000	0,00	-	100	8.139.900	-	793.900	-	705.500	-	-	-	-	1.499.400	0,00%	18,42%
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		10.500.000	0,00	-	4	8.139.900	1	793.900	1	705.500				2	1.499.400	50,00%	18,42%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase lapran data administrasi kepegawaian yang dimuktakhirkan (%)		572.400.000	0,00	-	100	59.822.100	-	3.647.500	-	23.404.450	-	-	-	-	27.051.950	0,00%	45,22%
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	32,00	42.400.000	0,00	-	24	-	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%
4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3,00	180.000.000	0,00	-	4	30.262.100	1	1.987.500	1	7.922.950				2	9.910.450	50,00%	32,75%
4.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	57,00	350.000.000	0,00	-	5	29.560.000	1	1.660.000	3	15.481.500				4	17.141.500	80,00%	57,99%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)		1.453.850.000	0,00	-	100	462.337.280	-	45.314.367	-	161.177.386	-	-	-	-	206.491.753	0,00%	44,68%
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	24,00	14.500.000	0,00	-	4	2.883.720	1	822.936	1	998.274				2	1.821.210	50,00%	63,15%
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15,00	8.500.000	0,00	-	3	57.500.000	2	-	-	17.500.000				2	17.500.000	66,67%	30,43%
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	71,00	35.000.000	0,00	-	4	7.538.810	1	2.156.489	1	2.932.839				2	5.089.328	50,00%	67,51%
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9,00	65.000.000	0,00	-	4	11.314.750	1	300.000	1	5.313.600				2	5.613.600	50,00%	49,61%
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	216,00	42.600.000	0,00	-	60	6.720.000	15	1.040.000	15	1.640.000				30	2.680.000	50,00%	39,88%
5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3,00	38.250.000	0,00	-	4	8.470.000	1	-	1	4.493.600				2	4.493.600	50,00%	53,05%
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	36,00	1.250.000.000	0,00	-	12	367.910.000	3	40.994.942	3	128.299.073				6	169.294.015	50,00%	46,02%

2024

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) 2024

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																			
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah kebijakan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan (%)	100,00	1.197.868.175	100,00	-	100	1.291.192.300		32.410.228		36.590.993		-		-	69.001.221	0,00%	5,34%
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase capaian pelaksanaan koodinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan (%)	300,00	1.197.868.175	0,00	-	95	1.291.192.300	-	32.410.228	-	36.590.993	-	-		-	69.001.221	0,00%	5,34%
1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)		1.197.868.175	0,00	-	100	43.055.900	-	1.917.000	-	4.244.100				-	6.161.100	0,00%	14,31%
	Pembentukan Paskibraka	*Jumlah Paskibraka (Orang)		-	0,00	-	70	1.248.136.400	-	30.493.228	-	32.346.893				-	62.840.121	0,00%	5,03%
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	5,34%	
									Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah	
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase capaian Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik (%)	100,00	4.563.007.315	100,00	-	100	30.734.119.565		48.562.500		28.464.822.430		-		-	28.513.384.930	0,00%	92,77%
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase capaian peningkatan partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik (%)		4.563.007.315	0,00	-	95	30.734.119.565	-	48.562.500	-	28.464.822.430	-	-		-	28.513.384.930	0,00%	92,77%

1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)		804.000.000	0,00	-	4	191.192.000	1	34.415.000	1	4.635.000					2	39.050.000	50,00%	20,42%
1.2	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)		3.559.807.315	0,00	-	20	30.467.142.365	-	-	20	28.438.926.430					20	28.438.926.430	100,00%	93,34%
1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)		199.200.000	0,00	-	4	75.785.200	1	14.147.500	1	21.261.000					2	35.408.500	50,00%	46,72%
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										99,57%	92,77%
									Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi (%)	100,00	340.150.000	100,00	-	100	58.543.600		1.000.000		12.720.000		-		-	-	13.720.000	0,00%	23,44%
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi (Unit)	312,00	340.150.000	0,00	-	104	58.543.600	-	1.000.000	-	12.720.000		-		-	-	13.720.000	0,00%	23,44%

1.1	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)		340.150.000	0,00	-	4	58.543.600	1	1.000.000	1	12.720.000					2	13.720.000	50,00%	23,44%
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50,00%	23,44%
									Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (%)	100,00	850.000.000	100,00	-	100	588.557.460		9.665.160		218.539.900		-		-	-	228.205.060	0,00%	38,77%
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta kerukunan umat beragama (%)		850.000.000	0,00	-	95	588.557.460	-	9.665.160	-	218.539.900		-		-	-	228.205.060	0,00%	38,77%
1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)		850.000.000	0,00	-	541	588.557.460	41	9.665.160	-	218.539.900					41	228.205.060	7,58%	38,77%
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										7,58%	38,77%
									Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
IV	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial (%)	100,00	2.510.000.000	100,00	-	100	1.483.046.450		14.390.000		293.564.600		-		-	-	307.954.600	0,00%	20,77%
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%)		2.510.000.000	0,00	-	95	1.483.046.450	-	14.390.000	-	293.564.600		-		-	-	307.954.600	0,00%	20,77%

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) 2024

Dari evaluasi hasil pelaksanaan renja yang disajikan pada tabel 2.1 diatas dapat didefinisikan bahwa realisasi pelaksanaan program, kegiatan & sub kegiatan secara umum dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.392.300,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 17.535.500,- atau 75,27% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 100%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.986.362.901,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 1.045.576.330,- atau 73,53% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 100%.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.139.900,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 1.499.400,- atau 34,23% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 100%.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.822.100,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 27.051.950,- atau 56,36% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 100%.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 447.337.280,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 206.491.753,- atau 69,13% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 95,29%.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.240.385.000,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 1.120.989.000,- atau 90,37% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 75%.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 106,300,000,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 36.375.494,- atau 75,66% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 100%.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 102.500.000,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 59.280.000,- atau 70,10% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 100%.

II. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.291.192.300,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 69.001.221,- atau 23,84% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 67%.

III. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.734.119.565,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 28.513.384.930,- atau 92,96% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 100%.

IV. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.543.600,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 13.720.000,- atau 37,32% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 100%.

V. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 588.557.460,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 228.205.060,- atau 77,64% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 67%.

VI. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.153.046.450,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Rp. 307.954.600,- atau 52,53% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 50%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi terhadap kehidupan politik dan meningkatkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan yang kondusif dalam lingkungan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur, yang dipimpin oleh kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja menggunakan indikator kinerja kunci sesuai dengan sasaran target yang ada dalam Renstra Tahun 2021-2026, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Renstra 2021 - 2026
Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun Realisasi Capaian					Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Anlisis
		2021	2022	2023	2024	2025	2024	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Indeks kerukunan umat beragama	74,31	75,89	75,92	76,00	76,34	0	76,85	Realisasi capaian indeks kerukunan ummat beragama sampai pada triwulan II belum diketahui sebab hasil dari pengukuran indeks kerukunan ummat beragama baru akan didapatkan pada akhir triwulan IV sesuai hasil survey kepada masyarakat, namun secara umum sampai pada triwulan II tahun 2024 tidak terjadi konflik keagamaan.	
2	Tingkat partisipasi politik Masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal	80,46	80,46	80,46	81,00	81,00	82,39	81,00	Data realisasi ini menggunakan data numerik hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Luwu Timur pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.	
3	Nilai SAKIP	66	67	69	72	72	0	72	Nilai SAKIP diberikan dari hasil penilaian Inspektorat Kabupaten terhadap dokumen SAKIP setiap akhir tahun sehingga realisasi untuk tahun 2024 masih 0 (belum rilis).	

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TPB dan SDGs
Kabupaten Luwu Timur

N O	Nomor Indikator TPB/ SDGs	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SAT UAN	THN 2016	THN 2017	THN 2018	THN 2019	THN 2020	THN 2021	THN 2022	THN 2023	RUMUS Metadata SDGs/TPB	Keterangan	OPD Pelak sana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ASPEK PELAYANAN UMUM												
		Kesbangpol												
1	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Kas us	1	2	2	2	0	0	0	0	Tidak ada Rumus		Kesba ngPol
2	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	%	0,1	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	$KDK = \frac{JK}{JP} \times 100\%$ Keterangan : KDK : Kematian disebabkan konflik JK : Jumlah korban meninggal disebabkan konflik JP : Jumlah penduduk	JK : Tahun 2016 (1 kasus), Tahun 2017 (2 kasus), Tahun 2018 (2 kasus), Tahun 2019 (2 kasus), Tahun 2020 (0 kasus), Tahun 2021-2023 (0 kasus). Dan Jumlah Penduduk (JP) : 100.000 jiwa	Kesba ngPol

3	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	%	0	0	0	0	0	0	0	0	$P\text{ PKK} = \frac{JPKK}{JP} \times 100\%$ Keterangan : P PKK : Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir JPKK : Jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir JP : Jumlah penduduk	JPKK : 6 Kasus, JP : 301,273	KesbangPol
4	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	%	0	0	0	0	0	0	0	0	$PPMA = \frac{JPMA}{JP} \times 100\%$ Keterangan : PPMA : Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya JPMA : Jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya JP : Jumlah penduduk	Indikator ke Satpol PP	-

Berdasarkan tabel 2.2 tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- Indeks Kerukunan Ummat Beragama

Untuk indikator yang pertama ini yakni melakukan pengukuran kerukunan ummat beragama di wilayah kabupaten luwu timur untuk mengetahui tingkat kerukunan ummat beragama di wilayah kabupaten luwu timur. Dalam mencapai indikator ini ada (tiga) program yang mendukung yakni ¹ Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, ² Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta ³ Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, Dimana target untuk tahun 2024 yakni 76,00% dan realisasi sampai dengan triwulan III belum diketahui sebab hasil dari pengukuran indeks kerukunan ummat beragama baru didapatkan pada akhir triwulan IV. Namun tingkat kerukunan ummat beragama untuk wilayah kabupaten luwu timur sampai pada triwulan III dalam keadaan aman dan terkendali.

- Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Nasional & Lokal

Untuk indikator yang kedua ini yakni melakukan sosialisasi yang masif kepada Masyarakat akan pentingnya partisipasi politik dalam rangka meningkatkan budaya politik suatu daerah. Dalam mencapai indikator ini ada 2 (dua) program yang mendukung yakni ¹ Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dan ² Program Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi Kemasyarakatan. Dimana target untuk tahun 2024 yakni 81,00% dengan realisasi sebesar 82,39% dengan capaian 100%. Data realisasi ini menggunakan data numerik hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Nilai SAKIP

Untuk indikator Nilai SAKIP, dimana target pada tahun 2024 yakni 72 poin dengan realisasi masih 0, karena pemberian nilai pada indikator ini menunggu dilakukannya evaluasi oleh Tim dari Inspektorat Kabupaten setiap akhir tahun dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsinya, masalah-masalah yang akan dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu :

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya antara lain sebagai berikut :
 - a. kurangnya pemahaman, kesadaran dan pengamalan terhadap 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di Masyarakat;
 - b. belum terbentuknya Lembaga teknis pusat pendidikan kebangsaan;
 - c. adanya kesenjangan antar etnik/etnis/suku yang ada di wilayah kabupaten luwu timur;
 - d. masih kurangnya pelaksanaan penyuluhan tentang pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada tokoh masyarakat maupun generasi muda dan pelajar di kabupaten luwu timur.
2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan antara lain sebagai berikut :
 - a. masih terbatasnya Pendidikan politik pada Masyarakat dan generasi muda;
 - b. kurangnya kesadaran pengurus parpol penerima bantuan keuangan dalam penyelesaian administrasi bantuan keuangan parpol.
 - c. belum maksimalnya pelaksanaan monev terhadap keberadaan ormas, parpol dan LSM di wilayah kabupaten luwu timur.

3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik antara lain sebagai berikut :
- a. adanya gesekan antar masyarakat maupun kelompok masyarakat yang dilatar belakangi oleh perbedaan suku, ras dan agama;
 - b. masih kurangnya koordinasi antar Lembaga sectoral di bidang kewaspadaan dini;
 - d. adanya kelompok-kelompok atau organisasi yang membawa paham – paham radikal yang menimbulkan konflik di masyarakat;
 - e. masih adanya warga negara asing yang keluar masuk di wilayah kabupaten luwu timur tanpa memiliki data yang lengkap.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan tingkat kinerja yang dicapai SKPD, dengan arahan Kepala daerah terkait prioritas program / kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Rumusan kebutuhan rencana program dan kegiatan tahun 2024 hasil review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja program / kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan yang disajikan dalam lampiran tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Belanja Operasi				37.851.659.559	Belanja Operasi				38.925.894.209
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	97 %	4.026.200.184	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	100 %	4.657.662.679
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 %	75.353.003	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 %	58.859.003
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dok	38.392.300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dok	36.692.300
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dok	4.492.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dok	5.017.400
c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Lap	32.468.303	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Lap	17.149.303
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %	1.986.362.901	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %	1.999.230.181
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Orang	1.895.421.301	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17 Orang	1.907.928.581
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	18 Lap	90.941.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	18 Lap	91.301.600
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100 %	8.139.900	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100 %	1.619.900
a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Lap	8.139.900	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Lap	1.619.900

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktakhirkan	100 %	59.822.100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktakhirkan	100 %	88.002.100
b	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 Dok	30.262.100	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 Dok	35.642.100
c	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	5 Orang	29.560.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	6 Orang	52.360.000
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase rata - rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100 %	447.337.280	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase rata - rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100 %	553.101.495
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan KesbangPol	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	2.883.720	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan KesbangPol	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	4.534.590
b	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Badan KesbangPol	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	42.500.000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Badan KesbangPol	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	62.000.000
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Badan KesbangPol	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	4 Paket	7.538.810	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Badan KesbangPol	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	4 Paket	12.231.905
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Badan KesbangPol	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	11.314.750	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Badan KesbangPol	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	18.014.750
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 Dok	6.720.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 Dok	8.040.000
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Badan KesbangPol	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Lap	8.470.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Badan KesbangPol	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Lap	11.495.000
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Lap	367.910.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Lap	436.785.250
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah perangkat daerah penunjang yang terpenuhi	100 %	1.240.385.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah perangkat daerah penunjang yang terpenuhi	100 %	1.736.600.000
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan KesbangPol	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit	1.070.325.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan KesbangPol	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	6 Unit	1.566.440.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b	Pengadaan Mebel	Badan KesbangPol	Jumlah paket mebel yang disediakan	34 Unit	28.000.000	Pengadaan Mebel	Badan KesbangPol	Jumlah paket mebel yang disediakan	34 Unit	24.100.000
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan KesbangPol	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	32.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan KesbangPol	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 Unit	41.000.000
d	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan KesbangPol	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	109.560.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan KesbangPol	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	105.060.000
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase rata - rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	106.300.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase rata - rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	85.600.000
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Lap	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Lap	1.000.000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Lap	43.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Lap	42.000.000
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Lap	61.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Lap	42.600.000
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %	102.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %	134.650.000
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan KesbangPol	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit	21.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan KesbangPol	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit	21.000.000
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan KesbangPol	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	40 Unit	22.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan KesbangPol	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	31 Unit	18.650.000
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Badan KesbangPol	Jumlah gedung kantor & bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Badan KesbangPol	Jumlah gedung kantor & bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	82.000.000
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Badan KesbangPol	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	9.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Badan KesbangPol	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	13.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase jumlah kebijakan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	95 %	1.291.192.300	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase jumlah kebijakan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	100 %	1.300.715.300
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase capaian pelaksanaan koordinasi di bidang ideology wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	95 %	1.291.192.300	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase capaian pelaksanaan koordinasi di bidang ideology wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	100 %	1.300.715.300
a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideology wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	100 Orang	43.055.900	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideology wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	60 Orang	22.880.900
b	Pembentukan Paskibraka	Badan KesbangPol	Jumlah Paskibraka	70 Orang	1.248.136.400	Pembentukan Paskibraka	Badan KesbangPol	Jumlah Paskibraka	74 Orang	1.277.834.400
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	95 %	30.734.119.565	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100 %	30.816.266.720
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase capaian peningkatan partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	95 %	30.734.119.565	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase capaian peningkatan partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100 %	30.816.266.720

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun	4 Dok	191.192.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun	4 Dok	232.327.000
b	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	20 Orang	30.467.142.365	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	20 Orang	30.508.154.520
c	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	4 Lap	75.785.200	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	4 Lap	75.785.200
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	100 %	58.543.600	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	100 %	58.395.600
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	104 Unit	58.543.600	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	104 Unit	58.395.600

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dibiidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	4 Lap	58.543.600	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dibiidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	4 Lap	58.395.600
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	95 %	588.557.460	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 %	585.507.460
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta kerukunan umat beragama	95 %	588.557.460	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta kerukunan umat beragama	100 %	585.507.460
a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	398 Orang	588.557.460	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	446 Orang	585.507.460
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatankualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	95 %	1.153.046.450	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatankualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100 %	1.507.346.450
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanfaatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	95 %	1.153.046.450	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100 %	1.507.346.450

NO	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	355 Orang	1.116.689.750	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	2610 Orang	1.470.989.750
b	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	4 Lap	36.356.700	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	4 Lap	36.356.700

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan Pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up). Perencanaan Pembangunan daerah kabupaten merupakan penjabaran pelaksanaan Pembangunan provinsi dan pusat, Pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2024 tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2024 dengan tema “Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Ketahanan Desa”.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Berpedoman pada arah Pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 dan isu strategis Tahun 2024.

Untuk mewujudkan daerah Kabupaten Luwu Timur yang berdaya saing, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dimasa sekarang dan yang akan datang membutuhkan perencanaan kebijakan yang lebih akurat dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusun Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

a. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan target Pembangunan daerah maka tujuan yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran FKUB dalam membangun kerukunan beragama serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

b. Sasaran

Dalam upaya menuju tercapainya tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur, maka sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD.

Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Peran FKUB dalam membangun Kerukunan beragama serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya	Persentase peningkatan peran FKUB dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya	1. Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis	Indeks kerukunan ummat beragama	76,00
			2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu nasional dan local	81,00
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Nilai SAKIP	72

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan target sasaran RENJA Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

Tabel 3.2
Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2024

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				11	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan	
				12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				15	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				18	Pengadaan Mebel
				19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				20	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan	
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	9	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	28	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	29	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				30	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
				31	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan	
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	11	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	32	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	12	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	33	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	13	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	34	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				35	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Renja Perubahan Tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merencanakan melaksanakan 6 (enam) Program, 13 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38.925.894.209,-. Alokasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Indikasi Pendanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024
Dan Rumusan Rencana Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					37.851.659.559	38.925.894.209		8.408.877.877
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota		100 %	100 %	4.026.200.184	4.657.662.679	100 %	3.540.784.046
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu		100 %	100 %	75.353.003	58.859.003	100 %	96.646.303
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Badan KesbangPol	3 Dok	3 Dok	38.392.300	36.692.300	2 Dok	43.211.500

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Badan KesbangPol	2 Dok	2 Dok	4.492.400	5.017.400	2 Dok	5.843.000
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Badan KesbangPol	0 -	0 -	-	-	2 Dok	5.843.000
d	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Badan KesbangPol	10 Lap	10 Lap	32.468.303	17.149.303	10 Lap	41.748.803
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik		100 %	100 %	1.986.362.901	1.999.230.181	100 %	2.229.628.440
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Badan KesbangPol	14 Org	14 Org	1.895.421.301	1.907.928.581	17 Org	2.158.348.940
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Badan KesbangPol	18 Lap	18 Lap	90.941.600	91.301.600	18 Lap	71.279.500
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar		100 %	100 %	8.139.900	1.619.900	100 %	12.488.500
a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Badan KesbangPol	4 Lap	4 Lap	8.139.900	1.619.900	4 Lap	12.488.500
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktakhirkan		100 %	100 %	59.822.100	88.002.100	100 %	146.495.803

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	Badan KesbangPol	24 Stel	24 Stel	-	-	32 Stel	46.484.803
b	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Badan KesbangPol	4 Dok	4 Dok	30.262.100	35.642.100	4 Dok	57.200.000
c	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Badan KesbangPol	5 Orang	5 Orang	29.560.000	52.360.000	6 Orang	42.811.000
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata - rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	447.337.280	553.101.495	100 %	581.650.000
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Badan KesbangPol	4 Paket	4 Paket	2.883.720	4.534.590	4 Paket	20.270.000
b	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Badan KesbangPol	3 Paket	3 Paket	42.500.000	62.000.000	4 Paket	137.500.000
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	Badan KesbangPol	4 Paket	4 Paket	7.538.810	12.231.905	4 Paket	8.608.600
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Badan KesbangPol	4 Paket	4 Paket	11.314.750	18.014.750	4 Paket	13.900.000
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Badan KesbangPol	60 Dok	60 Dok	6.720.000	8.040.000	60 Dok	8.040.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Badan KesbangPol	4 Lap	4 Lap	8.470.000	11.495.000	4 Lap	13.200.000
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Badan KesbangPol	12 Lap	12 Lap	367.910.000	436.785.250	12 Lap	380.131.400
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah perangkat daerah penunjang yang terpenuhi		100 %	100 %	1.240.385.000	1.736.600.000	100 %	283.670.000
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Badan KesbangPol	0 -	0 -	1.070.325.000	1.566.440.000	0 -	67.320.000
b	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Badan KesbangPol	34 Unit	34 Unit	28.000.000	24.100.000	10 Unit	100.800.000
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Badan KesbangPol	2 Unit	2 Unit	32.500.000	41.000.000	6 Unit	32.100.000
d	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Badan KesbangPol	2 Unit	2 Unit	109.560.000	105.060.000	1 Unit	83.450.000
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata - rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	100 %	106.300.000	85.600.000	100 %	104.455.000
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Badan KesbangPol	4 Lap	4 Lap	1.000.000	1.000.000	4 Lap	1.795.000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Badan KesbangPol	4 Lap	4 Lap	43.500.000	42.000.000	4 Lap	43.500.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Badan KesbangPol	4 Lap	4 Lap	61.800.000	42.600.000	4 Lap	59.160.000
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik		100 %	100 %	102.500.000	134.650.000	100 %	85.750.000
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Badan KesbangPol	4 Unit	4 Unit	21.000.000	21.000.000	4 Unit	24.000.000
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Badan KesbangPol	40 Unit	40 Unit	22.000.000	18.650.000	45 Unit	36.250.000
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor & bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	Badan KesbangPol	1 Unit	1 Unit	50.000.000	82.000.000	1 Unit	12.500.000
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Badan KesbangPol	1 Unit	1 Unit	9.500.000	13.000.000	1 Unit	13.000.000
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah kebijakan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan		95 %	95 %	1.291.192.300	1.300.715.300	95 %	1.806.052.500

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase capaian pelaksanaan koordinasi di bidang ideology wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan		100 %	100 %	1.291.192.300	1.300.715.300	95 %	1.806.052.500
a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideology wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Badan KesbangPol	100 Org	100 Org	43.055.900	22.880.900	100 Orang	66.928.000
b	Pembentukan Paskibraka	Jumlah PASKIBRAKA	Badan KesbangPol	70 Org	70 Org	1.248.136.400	1.277.834.400	70 Orang	1.739.124.500
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik		100 %	100 %	30.734.119.565	30.816.266.720	100 %	1.101.105.231

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase capaian peningkatan partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik		100 %	100 %	30.734.119.565	30.816.266.720	100 %	1.101.105.231
a	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun	Badan KesbangPol	4 Dok	4 Dok	191.192.000	232.327.000	4 Dok	84.524.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Badan KesbangPol	20 Orang	20 Orang	30.467.142.365	30.508.154.520	30 Orang	957.553.231
c	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Badan KesbangPol	4 Lap	4 Lap	75.785.200	75.785.200	4 Lap	59.028.000
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi		100 %	100 %	58.543.600	58.395.600	100 %	102.096.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi		104 Unit	104 Unit	58.543.600	58.395.600	104 Unit	102.096.000
a	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Badan KesbangPol	4 Lap	4 Lap	58.543.600	58.395.600	4 Lap	102.096.000
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		100 %	100 %	588.557.460	585.507.460	95 %	608.511.000
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta kerukunan umat beragama		100 %	100 %	588.557.460	585.507.460	100 %	608.511.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Badan KesbangPol	398 Orang	398 Orang	588.557.460	585.507.460	100 Orang	608.511.000
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatankualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial		100 %	100 %	1.153.046.450	1.507.346.450	100 %	1.250.329.100
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial		100 %	100 %	1.153.046.450	1.507.346.450	100 %	1.250.329.100
a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Badan KesbangPol	355 Orang	355 Orang	1.116.689.750	1.470.989.750	250 Orang	209.680.100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Badan KesbangPol	4 Lap	4 Lap	36.356.700	36.356.700	4 Lap	36.980.500
c	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten / kota	Badan KesbangPol	0 -	0 -	-	-	4 Dok	1.003.668.500

**BAB V
PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat dan kekuatan serta disiplin semua unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing – masing.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Malili, 16 Juli 2024
KEPALA BADAN,



GUNTUR HAFID, S.Pd., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19710502 199208 1 001